**Kurrikulum MBKM (mahasiswa luar)**

Semester III

1. Politik hukum
2. Siyasah dusturiyah
3. HTN

SEMESTER IV

1. Fiqh Mawaris
2. Tafsir Ahkam Syiasah
3. Hadist Ahkam Siyasah
4. Hukum Konstitusi
5. Perbandingan HTN

Semester V

1. Pemikiran Politik Islam Kontemporer
2. Siyasah Dauliyah
3. Syari’ah dan HAM
4. Hukum Acara PTUN
5. Hukum Administrasi Negara
6. Hukum Kepartaian dan Pemilu
7. Hukum Lembaga Negara

Semster VI

1. Hukum Lembaga Kepresidenan
2. Hukum Acara Mahkama Konstitusi
3. Ilmu Perundang-Undangan
4. Hukum Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Ilmu Negara

**Kurrikulum MBKM (mahasiswa Dalam)**

Semester VI

10 MK Pilihan

1. Qadlaya Siayasiyah
2. Perancangan Perundang-Undangan
3. Hukum Internasional
4. Hukum Lingkungan
5. Tehnik Perancangan Kontrak

10 MK Wajib

1. Hukum Lembaga Kepresidenan
2. Hukum Acara Perdata
3. Hukum Acara MK
4. Hukum Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Ilmu Perundang-Undangan

**MATA KULIAH MERDEKA BELAJAR – KURIKULUM MERDEKA (MBKM)**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH**

1. **MATA KULIAH NON PAKET**

**MBKM SEMESTER GANJIL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE MK** | **MATAKULIAH** | **SKS** | **SMT** | **CPL Mata Kuliah** |
| 1 | 20020311C32 | Politik Hukum | 2 | III | 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 3. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum |
| 2 | 20020311C36 | Siyasah Dusturiyah | 2 | III | 1. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam Siyasah Dusturiyyah 2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara; |
| 3 | 20020311C19 | Hukum Tata Negara | 2 | III | Mahasiswa memahami konsep/pengertian, asas, sistem dan struktur organisasi ketatanegaraan di indonesia, dengan demikian akan menjadi dasar/penuntun dalam berperilaku sebagai warganegara Indonesia sesuai norma/aturan yang berlaku |
| 4 |  | Pemikiran Politik Islam Kontemporer |  | V | 1. Mahasiswa menguasai konsep dasar perkembangan pemikiran politik islam 2. Mahasiswa mampu menganalisa perkembangan pemikiran politik islam baik secara teoritis dan praktis 3. Mahasiswa mampu menganalisa fenomena praktik-praktik pemikiran politik dalam perspektif politik islam 4. Mahasiswa mampu menjadi seorang individu dan atau pelaku politik yang mengimplementasikan prinsip-prinsip pemikiran politik islam secara konseptual maupun faktual |
| 5 |  | Siyasah Dauliyah |  | V | 1. Terwujudnya Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) yang mampu menganalisa, menetapkan Hukum Tata Negara yang integratife dan inter-konektif sesuai dengan tuntutan pengguna dengan memperhatikan kearifan local 2. Terciptanya Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) yang cerdas secara intelektual, spiritual, emosional, social dan berdaya saing dalam dunia kerja |
| 6 |  | Syari’ah dan HAM |  | V | Mahasiswqa mampu menerapkan dan memecahkan masalah-masalah (isu-isu) pelaksanaan dan pelanggaran HAM, khususnya yang ada di Indonesia |
| 7 |  | Hukum Acara PTUN |  | V | 1. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 2. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
| 8 |  | Hukum Administrasi Negara |  | V | Mahasiswa diharapkan memahami tugas dan kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas negara dalam upaya mencapai kemakmuran rakyat dengan tidak melanggar hak-hak asasi warganya serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kenegaraan tersebut |
| 9 |  | Hukum Kepartaian dan Pemilu |  | V | 1. Mampu menguasai konsep/ teori hukum secara umum 2. Mampu menerapkan dan memanfaatkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam menyelesaikan masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 3. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 4. Mampu mengkomunikasikan ilmu dan produk hukum baik secara tertulis maupun lisan |
| 10 |  | Hukum Lembaga Negara |  | V | Mampu memahami konsep dan teori konstitusi dalam keilmuan hukum, mengembangkan dalam penelitian hukum dan menyajikan sesuai dengan konstitusi di Indonesia serta mendorong hukum konstitusi sebagai sarana untuk mengkoordinasi atau mengintegrasikan lembaga dalam kerangka negara hukum. |

**MBKM SEMESTER GENAP**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE MK** | **MATAKULIAH** | **SKS** | **SMT** | **CPL Mata Kuliah** |
| 1 |  | Fiqh Mawaris |  | IV | Mahasiwa mampu menjelaskan pilihan-pilihan hukum dalam penghitungan warisan dan mampu menerapkan teori-teori penghitungan dan pembagian warisan islam di masyarakat |
| 2 |  | Tafsir Ahkam Siyasah |  | IV | Menyiapkan lulusan yang memiliki pemahaman tentang tafsir Ahkam dalam bidang siyasah |
| 3 |  | Hadist Ahkam Siyasah |  | IV | Menyiapkan lulusan yang memiliki pemahaman tentang hadis hadis hukum dalam bidang siyasah |
| 4 |  | Hukum Konstitusi |  | IV | 1. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 2. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 3. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ; |
| 5 |  | Perbandingan HTN |  | IV | 1. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data 2. Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum |
| 6 |  | Hukum Lembaga Kepresidenan |  | VI | Lulusan diharapkan memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan profesional berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data, serta bisa memilih solusi alternatif secara mandiri dan kelompok dalam memecahkan persoalan yang dihadapin sesuai dengan konteksnya untuk memperoleh hasil pembelajaran terbaik dan pengembangan peserta didik yang optimal |
| 7 |  | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi |  | VI | 1. Mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam proses dan praktik dengan pendekatan rasional komprehensif.(Keterampilan Khusus) 2. Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik futuristik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum (Penguasaan Pengetahuan) |
| 8 |  | Ilmu Perundang-Undangan |  | VI | 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri ; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu ; 3. Mampu berkomunikasi secara efektif secara verbal maupun menggunakan teknologi ; 4. Mampu mengintegrasikan keilmuan Peraturan Perundang-undangan ; 5. Mampu berpikir kreatif dan inovatif ; |
| 9 |  | Hukum Pemerintah Pusat dan Daerah |  | VI | 1. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 2. Mampu mengkomunikasikan ilmu dan produk hukum baik secara tertulis maupun lisan |
| 10 |  | Ilmu Negara |  | VI | 1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam konteks pengembangan atau implemetasi Ilmu Negara di Indonesia dengan memperhatikan dan menerapkan nilai keindonesiaan. 2. Mampu menuangkan kajian kritis untuk pengembangan integrasi keilmuan ke dalam bentuk penulisan makalah/karya ilmiah. |